



# **LAPORAN KINERJA ( LKJ ) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022**



**PEMERINTAH PESISIR SELATAN**

**Painan, Februari 2022**

## KATA PENGANTAR



**P**uji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menyajikan informasi tentang ukuran keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran 2022.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimana Laporan kinerja ini disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyusunan LKj Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggung jawaban atas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Kami mengharapkan adanya informasi-informasi berupa saran dan masukan, koreksi serta kritikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja penyelenggaraan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dimasa yang akan datang.

Kami sangat menyadari bahwa dalam laporan ini masih terdapat berbagai hal yang memerlukan penyempurnaan, baik dalam aspek penulisan, data-data dan materi laporan. Di harapkan penyajian LKj ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.



Akhir kata semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya, serta kekuatan kepada kita semua dalam mengemban amanah untuk meningkatkan Kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan Visi Kabupaten Pesisir Selatan yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera.

Painan, Februari 2023

KETUA PELAKSANA



Ir. H. DONI GUSRIZAL, MM

NIP. 19641106 199703 1 001

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 adalah laporan kinerja tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026. Visi dan Misi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Berencana Kabupaten Pesisir Selatan yang berpedoman pada RPJM sebagai berikut :

**Visi : "Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermatabat, Didukung Pemerintahan Yang Akuntabel dan Profesional"**

**Misi : "Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman Tenram dan Dinamis"** misi ke-6 RPJMD

Berdasarkan visi dan misi Perangkat Daerah, telah ditetapkan tujuan, indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menunjang visi dan misi Bupati Pesisir Selatan. Dalam menunjang Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 dengan 2 Sasaran Strategis dan 3 indikator kinerja Esselon II.

Hasil analisis dan evaluasi dari capaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah diukur dalam Bab III, keberhasilan/ kegagalan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan misi yang diemban dapat dilihat dari capaian indikator kinerja tahun 2022.

Pencapaian Kinerja untuk 2 (Dua) Sasaran Strategis dan 3 (Tiga) indikator kinerja yang berpedoman pada Misi 2 RPMJD sebesar **85,25%**. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori **Baik** dengan rincian capaian indikator kinerja per sasaran strategis dapat dilihat pada table berikut:



2022

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



**CAPAIAN KINERJA ( CK )  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Akumulasi Triwulan I, II dan III ( Bulan Januari s/d September )

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya Kapasitas Dalam Menghadapi Bencana.	1. Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiap Siagaan terhadap Bencana	75	89,36	119	KEGIATAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA			
						Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	81.758.820	74.234.520	90,80
						KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN / KOTA			
						Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	43.125.982	21.180.300	49,11
						Sub Kegiatan Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	61.412.500	48.554.650	79,06
SubKegiatan Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	6.581.030.872	5.903.447.128	89,70						
2.	Mewujudkan Penanganan bencana Yang Profesional.	1. Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	87	71,01	81,62	KEGIATAN PELAYANAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA			
						Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1.494.250.050	1.059.266.143	70,89



2022

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**



						<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten	27.059.350	21.064.250	77,84
<b>J U M L A H</b>						<b>J u m l a h</b>	<b>8.288.637.574</b>	<b>7.127.746.991</b>	<b>85,99</b>

Painan, 04 Oktober 2022

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan  
Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan,



**Ir.H.DONI GUSRIZAL,MM**

NIP. 19641106 199703 1 001



**2022**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUT .....	iii
DAFTAR ISI.....	v
<b>BAB I</b>	
PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang .....	I-1
1.2 Maksud Tujuan.....	I-2
1.3 Dasar Hukum.....	I-2
1.4 Strukur Organisasi.....	I-3
1.6 Kepegawaian .....	I-7
1.7 Sistematika Penyusunan.....	I-8
<b>BAB II</b>	
PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA .....	II-1
2.1 Rencana Strategis .....	II-1
2.1.1 Visi .....	II-1
2.1.2 Misi.....	II-1
2.1.3 Misi, Tujuan dan Sasaran .....	II-1
2.2 Perjanjian Kinerja.....	II-2
2.3 Indikator Kinerja Utama.....	II-2
<b>BAB III</b>	
AKUNTABILITAS KINERJA .....	III-1
3.1. Metodologi Penilaian Kinerja .....	III-1
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja.....	III-2
3.3. Capaian Kinerja .....	III-2
3.4. Akuntabilitas Keuangan .....	III-3
<b>BAB IV</b>	
PENUTUP .....	IV-1
4.1. Kesimpulan.....	IV-1
4.2. Saran.....	IV-2



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. LATAR BELAKANG

Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan dalam rangka pemenuhan ketentuan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya harus transparan dan akuntabel termasuk dalam pengembangan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah itu sendiri. Transparansi dan akuntabilitas pembangunan yang dilaksanakan tersebut dirangkum dan dijabarkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 merupakan laporan realisasi hasil penyelenggaraan kinerja tahun pertama dari lima tahun perencanaan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan. RPJMD merupakan landasan utama yang mengarahkan seluruh penyelenggaraan program dan kegiatan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menyusun LKJIP, sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dalam penyelenggaraan Kinerja dan pemenuhan prinsip akuntabilitas. LKJIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 ini juga merupakan bahan penting dalam proses evaluasi dan kajian internal organisasi dan informasi penting untuk masyarakat tentang hasil-hasil kinerja pemerintahan pada Tahun 2022.

## 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 adalah bentuk pertanggung jawaban tahunan Organisasi Perangkat Daerah kepada Pemerintah dan stakeholder atas pencapaian kinerja serta visi, misi tujuan dan sasaran yang diamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah berisikan informasi terkait dengan keberhasilan, kegagalan hambatan dan solusi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan. Informasi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar dalam penyempurnaan dokumen perencanaan dimasa yang akan datang, baik penyempurnaan penetapan sasaran dan target kinerja, maupun penyempurnaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk kebijakan yang diperlukan.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. *Aspek Akuntabilitas Kinerja* : bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKJIP 2022 sebagai sarana pertanggung jawaban Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2022. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai selama tahun 2022.
2. *Aspek Manajemen Kinerja* : bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKJIP 2022 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan bagi upaya - upaya perbaikan kinerja di masa datang.

## 1.3. DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 disusun mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya antara lain :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016–2021.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja ( SOTK ) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja ( SOTK ) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

#### 1.4. GAMBARAN UMUM OPD

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Yang Selanjutnya Disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana daerah di kabupaten pesisir selatan.
3. Kepala adalah Kepala BPBD Kabupaten Pesisir Selatan yang di jabat secara ex-officio oleh seorang sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

4. Unsur Pengarah adalah instansi yang terkait sebagai tenaga profesional berdasarkan bidang urusannya di lingkup BPBD Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Bencana adalah peristiwa atau Rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh factor alam dan atau factor non alam maupun factor manusia yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
6. Penyelenggaraan Penanggulangan bencana daerah adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Menjalankan Fungsi:
  1. Koordinasi Penanggulangan Bencana
  2. Komando Penanggulangan Bencana
  3. Pelaksana Penanggulangan Bencana

## 1.5. STRUKTUR ORGANISASI

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan unsur pelaksana daerah dibidang Penanggulangan Bencana dibawah tanggung jawab Bupati Kabupaten Pesisir Selatan melalui Sekretaris Daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan (Eselon II) sebagai mana tercantum dalam Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Rincian Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan diubah dengan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tanggal 15 September 2014 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 .Tahun 2015 Tentang Tata Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Penambahan Bidang Pemadam Kebakaran dengan 2 (dua) seksi yaitu Seksi Penanggulangan dan Pemadam Kebakaran dan Seksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran . Pada Tahun 2016 Terjadi Perubahan Regulasi Pemerintah Daerah Kabupaten

Pesisir Selatan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tanggal 1 November 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 Tanggal 25 November 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 maka 1 (satu) Bidang Pemadam Kebakaran tidak berada dalam Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dimulai Tahun 2017.

Fungsi Pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.;
- b. Pelaksanaan Kebijakan teknis bidang Kedaruratan dan Logistik;
- c. Pelaksanaan Kebijakan teknis bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan Administrasi Dinas;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan terdiri Dari :

1. Kepala Pelaksana
2. Sekretariat terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
  - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari:
  - a. Seksi Pencegahan.
  - b. Seksi Kesiapsiagaan.

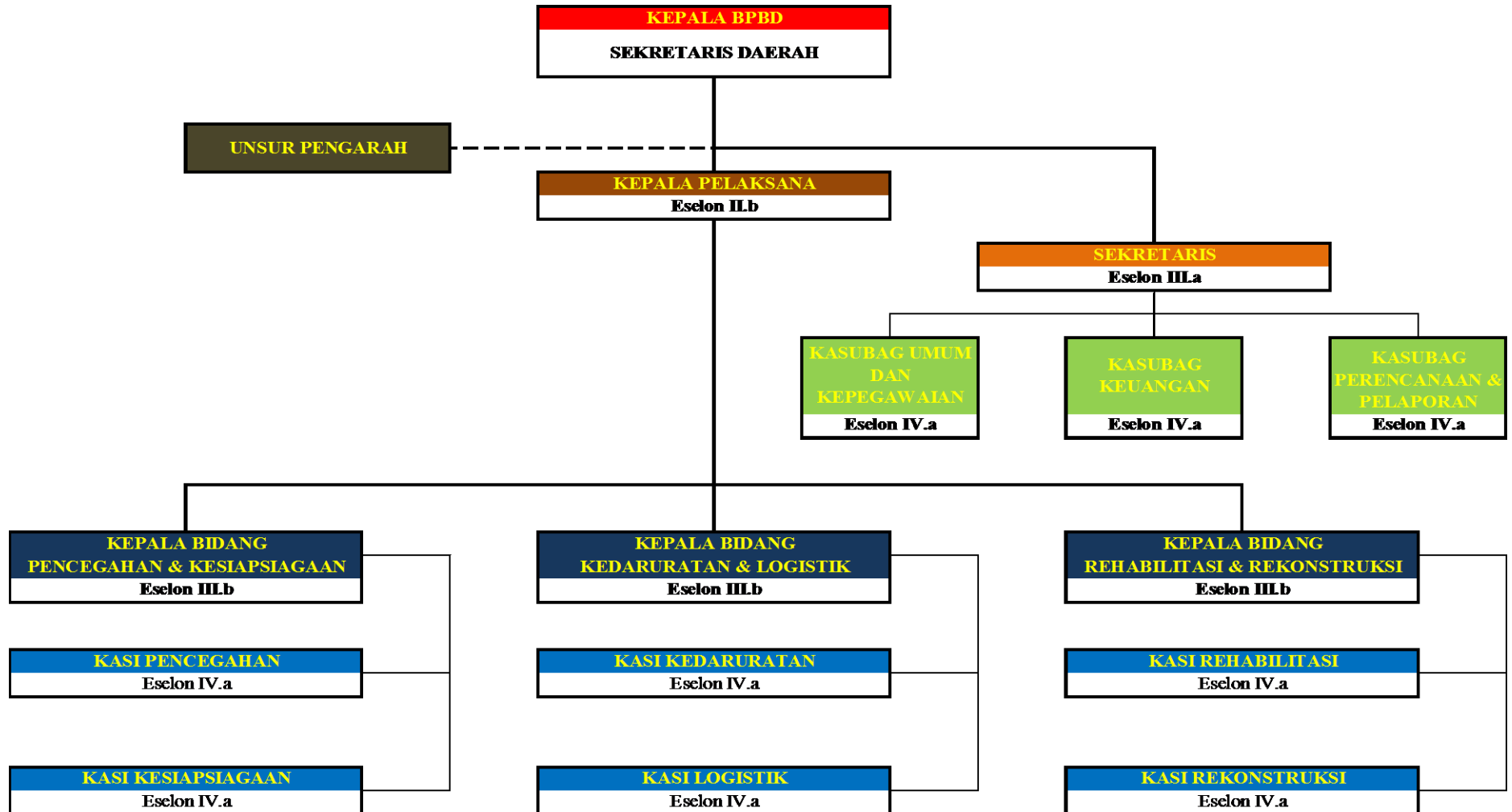


4. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari:
  - a. Seksi Kedaruratan
  - b. Seksi Logistik.
  
5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari:
  - a. Seksi Rehabilitasi.
  - Seksi Rekonstruksi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

Tabel 2.1 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BPBD  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2014**



## 1.6. KEPEGAWAIAN

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 86 orang yang terdiri dari PNS, Tenaga Sukarela. Untuk selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut :

Jumlah yang Pegawai dimiliki oleh BPBDB Kabupaten Pesisir Selatan ( per 31 Desember 2022)

GOLONGAN	ESSELON				Staf	Total
	II.b	III.a	III. b	IV.a		
Golongan : IV / d	0	0	0	0	0	0
Golongan : IV / c	1	0	0	0	0	1
Golongan : IV / b	0	0	0	0	1	1
Golongan : IV / a	0	1	2	0	2	5
Golongan : III/ d	0	0	1	3	3	7
Golongan : III/ c	0	0	0	4	1	5
Golongan : III/ b	0	0	0	1	4	5
Golongan : III/ a	0	0	0	0	2	2
Golongan : II / d	0	0	0	0	1	1
Golongan : II / c	0	0	0	0	1	1
Golongan : II / b	0	0	0	0	1	1
Golongan : II / a	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah PNS</b>	1	1	3	8	17	30
Tenaga Sukarela S1	0	0	0	0	16	16
Tenaga Sukarela DIII	0	0	0	0	1	1
Tenaga Sukarela SMA	0	0	0	0	43	43
Jumlah Tenaga Sukarela	0	0	0	0	60	60
<b>Total</b>	1	1	3	8	77	<b>150</b>



## 1.7. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 menjelaskan pencapaian kinerja tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Metode evaluasi yang digunakan adalah metode sederhana dengan membandingkan antara target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja. Analisa terhadap keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis adalah dengan mengurai penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dimaksud. Sedangkan analisis program/kegiatan menguraikan tentang efisiensi penggunaan anggaran yang tersedia dan menguraikan keterkaitan antara program dengan indikator kinerja dan target kinerja yang ditetapkan.

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. **Bab I : Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas tentang Organisasi, maksud dan tujuan, dasar hukum dan sistematika penyajian.
2. **Bab II : Perencanaan Kinerja**, menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2022.
3. **Bab III : Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan:
  - a. Capaian Kinerja  
Pada subbab ini disajikan hasil pengukuran kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022, evaluasi dan analisis capaian kinerja
  - b. Realisasi Anggaran  
Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja.
4. **Bab IV : Penutup**, berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja tahun 2022 dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk peningkatan kinerja.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

#### 2.1. RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 telah disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

##### 2.1.1. Visi

Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan (*stakeholders*). Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tergambar dalam suatu bentuk. Untuk mencapai masa depan dengan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dan mengacu pada Visi Bupati Pesisir Selatan yaitu:

**"Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermatabat, Didukung Pemerintahan Yang Akuntabel dan Profesional"**

Visi tersebut di atas memberikan pengertian mengenai kondisi masyarakat di masa depan yang menggambarkan tujuan dan sasaran Strategis penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah daerah, DPRD, Dunia usaha dan masyarakat pada umumnya

##### 2.1.2. Misi

Misi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Berencana Kabupaten Pesisir Selatan yang berpedoman pada RPJM sebagai berikut :

**"Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman Tentram dan Dinamis"** misi ke-6 RPJMD.

##### 2.1.3. Tujuan

Tujuan dari Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang berpedoman pada RPJM sebagai berikut :



**“Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tenram dan Dinamis”**

**2.1.4. Sasaran**

**Sasaran yaitu “Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri”.**

**2.2. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022 :

<b>NO</b>	<b>SASARAN (Sasaran Kepala OPD)</b>	<b>INDIKATOR KINERJA ESS.II</b>		<b>TARGET 2022</b>
1.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi.	1	Peningkatan Kapasitas Dalam Penanggulangan Bencana	85%
2	Terwujudnya Nagari yang Mandiri Dalam Penanganan Bencana.	1	Jumlah Nagari Mandiri Penanganan Bencana	16 Nagari
		2	Inovasi SIGAP DANA (Sistem Informasi Tanggap Darurat Bencana)	100%
			.	

## Penjelasan Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2021-2026

Agar seluruh stakeholder pembangunan memiliki persepsi yang sama terhadap IKU Pemerintah daerah Tahun 2021-2026, maka setiap indikator akan dijelaskan terkait definisi operasional, formula perhitungan, sumber data dan perangkat daerah penanggung jawab/ pelaksana program untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Penjelasan masing-masing IKU Pemerintah daerah tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

### Jumlah Nagari Tangguh Bencana

Level dalam RPJMD : Indikator Sasaran

Defenisi Operasional : Indikator jumlah nagari tangguh bencana adalah untuk melihat banyaknya nagari yang telah memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan.

Formulasi : Jumlah nagari yang sudah memenuhi kriteria tangguh bencana

Sumber data : BPBD

Penanggung Jawab : DPMDP2KB, BPBD

### 2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	OUTLOK	TARGET SETIAP TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ke -52 RPJMD	Jumlah Nagari Tangguh bencana	Nagari	Pratama (20)	Pratama (45)	Pratama (57)	Pratama (67)	Pratama (77)	Pratama (87)
			Madya (0)	Madya (0)	Madya (2)	Madya (4)	Madya (6)	Madya (8)
			Utama (0)	Utama (0)	Utama (6)	Utama (8)	Utama (10)	Utama (12)

**Faktor Keberhasilan:**

1. Pendekatan Langsung Ke Nagari-Nagari Untuk Pembinaan KSB
2. Menyediakan Dana Sosialisasi Tentang Nagari Tangguh dari APBD
3. Pendekatan Dengan OPD Terkait dan Penyaluran Program Mitigasi Bencana
4. Menggandeng Swasta Untuk Dapat Berpartisipasi Dalam Mitigasi Bencana di Nagari

Indikator ini Ditunjang Oleh Program Penanggulangan Bencana Dengan Target Anggaran Rp.4.126.911.404,- dan Realisasi Sebesar Rp.863.916.085,- Atau Capaian 21% Berdasarkan Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.4.126.911.404 Atau 21%.

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. METODOLOGI PENILAIAN KINERJA

Pengukuran Kinerja adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022. Metode pengukuran kinerja digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.

**Tabel 3.1.**

**Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022**

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Gagal

### 3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

NO	SASARAN STRATEGIS (Sasaran Kepala OPD)	INDIKATOR KINERJA ESS.II		TARGET 2022	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	1	Peningkatan Kapasitas Dalam Penanggulangan Bencana	85 %	71.01%	81.62%
2	Terwujudnya Nagari yang Mandiri Dalam Penanganan Bencana	1	Jumlah Nagari Mandiri Penanganan Bencana	16 Nagari	20 Nagari	119%
		2	Inovasi SIGAP DANA ( Sistem Informasi Tanggap Darurat Bencana )	100%	100%	100%

#### Faktor Keberhasilan:

1. Pendekatan Langsung Ke Nagari-Nagari Untuk Pembinaan KSB
2. Menyediakan Dana Sosialisasi Tentang Nagari Tangguh dari APBD
3. Pendekatan Dengan OPD Terkait dan Penyaluran Program Mitigasi Bencana
4. Menggandeng Swasta Untuk Dapat Berpartisipasi Dalam Mitigasi Bencana di Nagari

### 3.3. CAPAIAN KINERJA

Sasaran 1: Meningkatnya Tata Kelola Organisasi

NO	SASARAN STRATEGIS (Sasaran Kepala OPD)	INDIKATOR KINERJA ESS.II		TARGET 2022	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	1	Peningkatan Kapasitas Dalam Penanggulangan Bencana	85 %	71.01%	81.62%

a. Meningkatnya Kapasitas Dalam Menghadapi Bencana

NO	INDIKATOR KINERJA ESS.II	TARGET 2021	REALISASI Tahun 2021	CAPAIAN Tahun 2021	TARGET 2022	REALISASI Tahun 2022	CAPAIAN Tahun 2022
1.	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	70%	70%	96%	75%	89,36%	119%

a. Terwujudnya Penanganan Bencana Yang Profesional

NO	INDIKATOR KINERJA ESS.II	TARGET 2021	REALISASI Tahun 2021	CAPAIAN Tahun 2021	TARGET 2022	REALISASI Tahun 2022	CAPAIAN Tahun 2022
2	Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban	79%	72%	96%	87%	71,01%	81,62%



Bencana							
---------	--	--	--	--	--	--	--

b. Terwujudnya Pelayanan Informasi di Daerah Rawan Bencana

NO	INDIKATOR KINERJA ESS.II.	TARGET 2020	REALISASI Tahun 2020	CAPAIAN Tahun 2020	TARGET 2021	REALISASI Tahun 2021	CAPAIAN Tahun 2021
3	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	-	-	-	-	-	-

Penjelasan Setiap Indikator dan Program Pendukung

1. Persentase warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
2. Persentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
  - KRB
  - Sosialisasi warga berupa langsung pamphlet dan media social (Youtube,instagram dan FB)
  - Program Pendukung: Banyaknya Terbentuk Nagari Tangguh Bencana
3. Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Jumlah Waga Negara yang terselamatan akibat bencana

Program : penanggulangan bencana dengan kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.



2022

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



## CAPAIAN KINERJA ( CK )

### BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

### TAHUN ANGGARAN 2022

Akumulasi Triwulan I, II , III dan IV ( Bulan Januari s/d September )

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya Kapasitas Dalam Menghadapi Bencana.	1. Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiap Siagaan terhadap Bencana	75	89,36	119	<b>KEGIATAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA</b>			
						Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	81.758.820	80.169.520	98,06
						<b>KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN / KOTA</b>			
						Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	43.125.982	42.409.550	98,34
						Sub Kegiatan Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	61.412.500	61.293.650	99,81
Sub Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	7.035.296.972	7.025.680.456	99,86						
2.	Mewujudkan Penanganan bencana Yang Profesional.	1. Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	87	71,01	81,62	<b>KEGIATAN PELAYANAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA</b>			
						Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1.538.783.279	1.527.436.893	99,26
						Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten	32.834.350	32.729.250	99,68



2022

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**



<b>J U M L A H</b>						<b>J u m l a h</b>	8.793.211.903	8.769.719.319	99,73



2022

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



## BAB IV PENUTUP

### 4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian akuntabilitas kinerja yang dijelaskan pada Bab III, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

#### 1. Capaian Sasaran

Dari 3 (sebelas) sasaran yang telah ditetapkan, 1 (satu) sasaran mempunyai capaian indikator kinerja mencapai 100%, dan rata-rata nilai capaian indikator kinerja masing-masing sasaran adalah 89,5%, dengan nilai tertinggi adalah 100% yaitu sasaran “Meningkatnya Kapasitas Dalam Menghadapi Bencana”. Untuk nilai terendah adalah 72,5% yaitu sasaran “Pemulihan Daerah Terdampak Bencana”.

#### 2. Capaian Indikator Kinerja

Dari 4 (empat) indikator kinerja yang telah ditetapkan, sebanyak 1 (satu) indikator kinerja berhasil mencapai target dan 3 (tiga) indikator kinerja belum mencapai target. Adapun rata-rata seluruh nilai capaian indikator kinerja adalah 85,25%, dengan nilai tertinggi adalah 100% yaitu indikator kinerja “Level Peningkatan Kapasitas Dalam Penanggulangan Bencana”, sedangkan indikator kinerja yang nilainya terendah 60% yaitu indikator kinerja “Persentase Terbangunnya Fasilitas Publik Daerah Dampak Bencana”.

#### 3. Capaian Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran

Anggaran pada tahun 2022 adalah sebesar Rp.12.920.123.307,- terealisasi sebesar Rp.12.773.175.565,- atau 99%. Dari 21 (dua puluh satu) sub-kegiatan, capaian anggaran belanja tertinggi adalah sub-kegiatan “Penanganan Pasca Bencana” dan sub-kegiatan “Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana” yaitu 100% dan terendah adalah sub-kegiatan “Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor” yaitu 11%. Pencapaian yang sangat rendah ini disebabkan pada perubahan anggaran tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir



Selatan mendapatkan Dana Hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang sifatnya Luncuran untuk Tahun 2022 sebesar Rp.6.652.555,800.

#### 4.2. SARAN

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka dilakukan upaya-upaya, antara lain:

1. Melakukan inovasi-inovasi baru serta penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang mendorong dalam pencapaian target kinerja;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi di internal secara rutin dan berkala dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program-program serta untuk mengantisipasi kendala-kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program;
3. Melakukan pembinaan, pendidikan dan pelatihan bagi pegawai dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai agar pegawai dapat lebih cepat merespon kebutuhan yang ada di masyarakat
4. Meningkatkan kerjasama dan peran serta *stakeholders* atau pemangku kepentingan baik dengan pemerintah pusat, instansi pemerintah lainnya, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta elemen masyarakat lainnya dalam melaksanakan program-program sehingga dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.